

**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI  
NOMOR : 107/MPP/Kep/2/98**

- |               |                     |   |
|---------------|---------------------|---|
| 1. Lampiran 1 | Formulir Model PM 1 | : Permintaan Izin Usaha Pasar Modern  |
| 2. Lampiran 2 | Formulir Model PM 2 | : Izin Usaha Pasar Modern (IUPM)  |
| 3. Lampiran 3 | Formulir Model PM 3 | : Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha<br>Pasar Modern                                       |
| 4. Lampiran 4 | Formulir Model PM 4 | : Peringatan pertama/dua/ketiga Tentang<br>pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Pasar<br>Modern |
| 5. Lampiran 5 | Formulir Model PM 5 | : Pembekuan Izin Usaha Pasar Modern   |
| 6. Lampiran 6 | Formulir Model PM 6 | : Pencabutan Izin Usaha Pasar Modern  |
| 7. Lampiran 7 | Formulir Model PM 7 | : Program Kemitraan   |

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI**

**T. ARIWIBOWO**

**Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI**  
**Nomor : 107/MPP/Kep/2/1998**

**Lampiran 1**

**Model PM 1**

**Diisi oleh Penanggung Jawab**  
**Perusahaan (Direksi)**

Nomor :  
Lampiran : ..... 1998  
Perihal : Permohonan Izin Usaha Kepada Yth.  
Pasar Modern (IUPM) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam  
Negeri  
Di -  
JAKARTA

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha Pasar Modern (baru, hilang, rusak) \*) di Daerah Tingkat I/II/Ibukota Propinsi/Ibukota Kabupaten/Kotamadya ....., dengan data dan dokumen yang dilampirkan sebagai berikut :

**I. Ketentuan Umum**

**A. Ketentuan Permohonan dan Perusahaan :**

**1. Pemohon :**

- a. Nama lengkap pemohon  
(penanggung jawab  
Perusahaan/Direksi) :
- b. Alamat rumah : Jl. ....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....
- c. Telepon/Faximile : .....

**2. Perusahaan :**

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat lengkap :
- c. Telepon/Faximile :
- d. Bentuk Hukum Perusahaan : PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan \*)
- e. Perusahaan dalam rangka : - PMDN  
- PMA  
- Non PMDN/Non PMA
- f. Nama Notaris dan Nomor  
Pendirian perusahaan :
- g. Kegiatan Usaha Pokok  
(sebutkan sesuai dalam  
Akte pendirian perusahaan) :

## B. Keterangan Bangunan Pasar Modern

1. Alamat lokasi :
2. Luas tanah :
3. Luas bangunan :
4. Surat Ijin Lokasi Nomor : ..... dari Badan Pertanahan Nasional
5. Surat Izin Prinsip Nomor : ..... dari Walikota/madya/Bupati
6. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : ..... dari Pemda TK.I/TK.II \*)
7. Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : ..... dari Pemda TK.I/TK.II \*)
8. Surat Peruntukan Lahan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : ..... dari Badan Pertanahan Nasional
9. Luas Gudang : ..... M2
10. Fasilitas dalam Bangunan/Gedung :
  - a) Pendingin Ruangan (AC) : Ya/Tidak \*) ..... Buah
  - b) Eskalator/tangga berjalan Dengan tangga mesin : Ya/Tidak \*) ..... Buah
  - c) Lift : Ya/Tidak \*) ..... Buah
  - c) Lain-lain

Jumlah Kios/ruangan  
Untuk pedagang

## II. Nilai Investasi :

### A. Modal Tetap :

1. Tanah : Rp.
2. Bangunan/Gedung : Rp.
3. Mesin/Peralatan : Rp.
4. Lain-lain : Rp.

### B. Modal Kerja : Rp.

### C. Sumber Modal

1. Modal sendiri : Rp.
2. Pinjaman : Rp.
3. Bank Dalam Negeri : Nama :  
Alamat :  
Bank Luar Negeri : Nama :  
Alamat :

III. Keterangan Lain :

A. Dokumen yang dilampirkan :

1. Surat Izin Prinsip dari Bupati/Walikota/DK II dilampiri RTRW/RDTRW
2. Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
3. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Surat Peruntukan Lahan
7. Akte Pendirian Perusahaan
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Program Kemitraan
11. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi Pasar Modern khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN)
12. Program atau hasil kajian pemantauan lingkungan Komponen Lingkungan AMDAL SOSEK Kajian Aspek Sosial Budaya.

B. 1. Permohonan Izin Karena IUPM rusak : dilampiri dengan IUPM yang telah rusak

2. Permohonan Izin karena IUPM hilang : dilampiri dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat.

Demikian Surat Permintaan Izin ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar kami sedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 1998

Asli bermeterai Rp. 2000

.....  
Nama Lengkap Pemohon

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

**Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI**  
**Nomor : 107/MPP/Kep/2/1998**

**Lampiran 2**

**Model PM 2**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
NOMOR : .....  
TENTANG  
IZIN USAHA PASAR MODERN (IUPM)  
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Membaca :

Surat permintaan dari ..... No. .... Tanggal ..... perihal .....

Menimbang :

- a. bahwa pemohon telah memperoleh Saran dan Pendapat dari Menteri dalam Negeri dan koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil.
- b. bahwa pemohon telah melaksanakan program kemitraan dengan Pengusaha Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional.
- c. bahwa atas dasar pertimbangan diatas, permohonan tersebut diberikan dan perlu dikeluarkan Keputusan.

Mengingat :

1. Keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 145/MPP/Kep/2/97 dan No. 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/7/97 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 420/MPP/Kep/10/97 tentang pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor .... /DJPDN/Kep/II/1998 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 1998.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA :**

Memberikan Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) kepada

Atas nama :

Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala paling lambat tanggal 31 Juli untuk Semester I dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester II kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tembusan kepada Departemen Dalam Negeri, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan/Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

**KEDUA :**

Pelaksanaan Pengawasan Teknis terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum PERTAMA Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat yang kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

**KETIGA :**

Izin Usaha Pasar Modern ini berlaku selama perusahaan Pasar Modern menjalankan kegiatan usaha;

**KEEMPAT :**

Perusahaan yang melakukan pemindahan lokasi Pasar Modern wajib memperoleh Izin Usaha Pasar Modern baru;

**KELIMA :**

Apabila Izin Usaha Pasar Modern rusak atau hilang dapat diganti dengan mengajukan permintaan penggantian IUPM secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan dilampiri Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat, dan IUPM asli untuk penggantian yang rusak/tidak terbaca.

**KEENAM :**

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

**DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
4. Dirjen PUOD, Depdagri
5. Peringgal

**Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI**  
**Nomor : 107/MPP/Kep/2/1998**

**Lampiran 3**

**Model PM 3**

**LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA PASAR MODERN**  
**TAHUN .....**

No.	Bulan Kegiatan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Jumlah Kios/Etalase						
2.	Jumlah Perdagangan						
3.	Omset (dalam rupiah)						
4.	Jenis barang						
5.	Jumlah Tenaga Kerja						
	- Laki-laki						
	- Perempuan						
6.	Kemitraan						
	(berapa banyak)						
	a.						
	b.						
	c.						
	d.						
	e.						
	f.						
	g.						
	h.						
	i.						
7.	Dan lain-lain						

Catatan :

1. Laporan disampaikan secara Berkala 6 (enam) bulan sekali
2. Untuk 6 (enam) bulan pertama tanggal 31 Juli
3. Untuk 6 (enam) bulan kedua tanggal 31 Januari tahun berikutnya

.....1998  
Penanggung Jawab Perusahaan

(Direksi)

**Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI  
Nomor : 107/MPP/Kep/2/1998**

**Lampiran 4**

**Model PM 4**

Diisi oleh Pejabat  
Unit Kerja

Nomor	:	/DJPDN/...../1998	Jakarta, ..... 1998
Lampiran	:		
Perihal	:	Peringatan Pertama/Kedua/Ketiga Tentang pelaksanaan ketentuan Izin Usaha Pasar Modern	Kepada Yth. ..... ..... Di .....

Sesuai dengan Izin Usaha pasar Modern Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam kegiatan usaha Pasar Modern .....dengan lokasi di ..... setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan perijinan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

**DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
4. Dirjen PUOD, Depdagri
5. Peringgal



**Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI  
Nomor : 107/MPP/Kep/2/1998**

**Lampiran 5**

**Model PM 5**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBEKUAN IZIN USAHA PASAR MODERN

**Menimbang :**

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap kegiatan usaha Pasar Modern sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Pasar Modern Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... dengan lokasi di ..... ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Surat Izin Usaha Pasar Modern yang bersangkutan perlu dibekukan.

**Mengingat :**

1. Keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 145/MPP/Kep/2/97 dan No. 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/7/97 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 420/MPP/Kep/10/97 tentang pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor .... /DJPDN/Kep/II/1998 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 1998.

**Memperhatikan :**

1. Surat dari ..... Nomor ..... Tanggal ..... Perihal teguran ke 3 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pasar Modern
2. Surat ..... Nomor ..... Tanggal ..... Perihal .....

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA :**

Pembekuan Izin Usaha Pasar Modern yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor ..... /DJPDN/Kep/II/1998

Atas nama :

Alamat :

**KEDUA :**

Bagi Perusahaan yang dikenakan Pembekuan Izin Usaha Pasar Modern, agar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan Pembekuan agar melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Izin Usaha Pasar Modernnya dicabut.

**KETIGA :**

Dengan dibekukan Izin Usaha Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Pasar Modern terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan Pembekuan Izin Usaha Pasar Modern ini.

**KEEMPAT :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

**DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

(.....)

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
4. Dirjen PUOD, Depdagri
5. Peringgal

**Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI  
Nomor : 107/MPP/Kep/2/1998**

**Lampiran 6**

**Model PM 6**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PENCABUTAN IZIN USAHA PASAR MODERN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Pasar Modern sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Pasar Modern Nomor ..... tanggal ..... atas nama .....
- b. berdasarkan Keputusan MPP No. .... /MPP/Kep/2/98 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian IUPM ternyata perusahaan ..... tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan dimaksud sehingga surat Izin Usaha Pasar Modern yang bersangkutan dicabut dan perlu dikeluarkan Keputusan.

Mengingat :

1. Keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 145/MPP/Kep/2/97 dan No. 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/7/97 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 420/MPP/Kep/10/97 tentang pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 1998.

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor ..... tanggal ..... Perihal pembekuan Izin Usaha Pasar Modern atas nama ..... Dengan alamat .....
2. Surat dari ..... Nomor ..... Tanggal..... Perihal .....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA :**

Mencabut Izin Usaha Pasar Modern yang ditetapkan dengan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal .....

Atas nama :

Alamat :

**KEDUA :**

Dengan dicabutnya Izin Usaha Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Pasar Modern dan diwajibkan mengembalikan surat Izin Usaha Pasar Modern tersebut kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

**KETIGA :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

**DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

(.....)

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
6. Dirjen PUOD, Depdagri
7. Petinggal

\*) Dapat ditambah halaman bila perlu